



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **PEMANTAUAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2019 LINGKUP PENUGASAN KEMENDAGRI**

**Oleh:  
Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja**

*Jakarta, 23 April 2019*



# Pelaksanaan Program Prioritas K/L

## Pelaksanaan Rencana Aksi (RenAksi)



Pemantauan dilakukan oleh:

- a. Kantor Staf Presiden (KSP) melalui *Aplikasi SISPAN KSP*;
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui *Aplikasi Jaga*;
- c. Tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA).

## Pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PN)



Pemantauan Dilakukan Oleh:

- a. Bappenas melalui aplikasi *e-monev*;
- b. Kemenkeu melalui aplikasi *smArt*;
- c. KSP melalui aplikasi *SISPAN*.



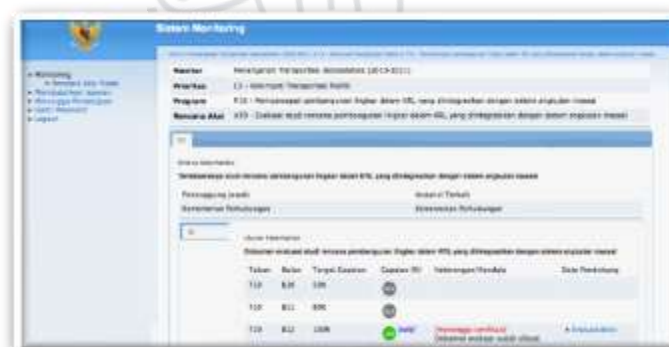
# Pemantauan Program Prioritas– Online Reporting

## Pelaporan Program Prioritas K/L

**E-MONEV  
BAPPENAS**



**SISTEM PEMANTAUAN  
KANTOR STAF  
PRESIDEN**



**SMART PMK 249  
KEMENKEU**



**APLIKASI  
JAGA**



# **1. PELAKSANAAN RENCANA AKSI**





# MEKANISME PENYUSUNAN DAN PELAPORAN RENAKSI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI

## Kementerian Dalam Negeri

### Biro Perencanaan

- Melakukan konsolidasi internal dengan unit Koordinator teknis Renaksi utk finalisasi Aksi
- Fasilitasi proses inputing pada SISPAN KSP.

### Koordinator

- Mengkoordinasikan walidata secara substansi terkait rumusan kriteria ukuran keberhasilan Renaksi, serta data dukung.
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Biro Perencanaan maupun instansi lainnya penanggung jawab Renaksi.

### Unit Pelaksana/ Wali Data

- Merumuskan penajaman kriteria ukuran keberhasilan Renaksi, serta mempersiapkan data dukung.
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Koordinator maupun instansi lainnya penanggung jawab Renaksi.

Penyusunan Penajaman Kriteria dan Ukuran Keberhasilan: Masing-masing Unit Kerja Penanggung Jawab Aksi agar mengawal pembahasannya dengan memperhatikan:

- ☐ lingkup kewenangan;
- ☐ tugas dan fungsi;
- ☐ dukungan anggaran;
- ☐ kemampuan pencapaian target ; serta
- ☐ prioritas dan dukungan kebijakan, baik nasional maupun Kemendagri.

### Instansi Penanggung Jawab Renaksi

- Melakukan koordinasi dengan mitra K/L mengenai penyampaian matriks F8K Renaksi.
- Melakukan verifikasi dan memberi masukan perbaikan terhadap matriks F8K Renaksi.



# Siklus Pengendalian Prioritas Nasional (Renaksi Janji Presiden) melalui Sispan KSP

## PENGELOLAAN

- Rencana Aksi disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan
- K/L melaksanakan Rencana Aksi yang menjadi tanggung jawabnya
- Tiap Rencana Aksi memiliki target antara yang dilaporkan secara triwulanan

## PELAPORAN KEPADA PRESIDEN (DAN SIDANG KABINET)

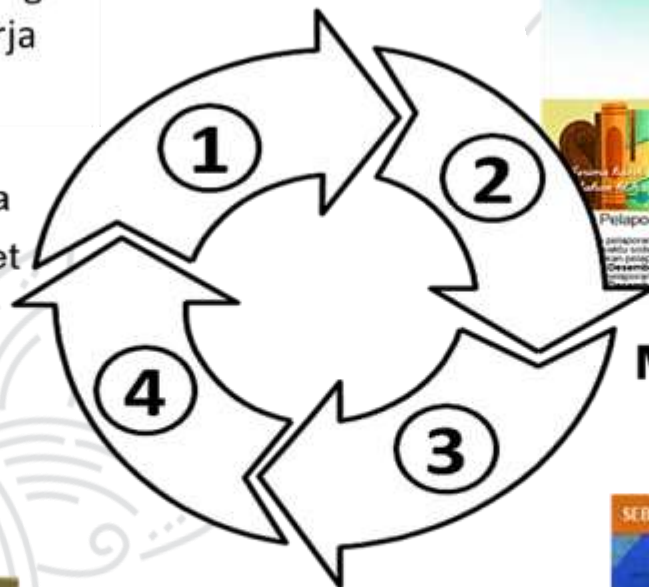


## PELAPORAN ON-LINE OLEH K/L

Sistem Monitoring  
Pemerintah  
Efisiensi internal, Pelayanan pemerintahan yang demokratis

Contoh PENGISIAN FORMAT 8 KOLOM UNTUK P010

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN BSA, B06, B08, B10, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>NSPT: Peningkatan produksi pangan</b>							
TSP1A10: Penyaluran pupuk bersubsidi	Kementerian Pertanian		Penyaluran pupuk bersubsidi	11,06 juta ton pupuk bersubsidi	TARGET B04: Penetapan penyaluran pupuk bersubsidi di 33 provinsi. Penyaluran 3,5 juta ton pupuk bersubsidi	B04: xx%	100%
					TARGET B06: Penyaluran 5,2 juta ton pupuk bersubsidi	B06: xx%	100%
					TARGET B08: Penyaluran 7 juta ton pupuk bersubsidi	B08: xx%	100%
					TARGET B10: Penyaluran 8,2 juta ton pupuk bersubsidi	B10: xx%	100%
					TARGET B12: Penyaluran 11,06 juta ton pupuk bersubsidi	B12: xx%	100%



## MONITORING & VERIFIKASI Blusukan (Insitu)



E-blusukan

Verlap  
BPKP





# Capaian Rencana Aksi Lingkup Penugasan Kemendagri TA.2018

## RENCANA AKSI OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Penanggungjawab Renaksi Ditjen Bangda, Dukcapil dan Ditjen Keuda dengan target 5 Output Ukuran Keberhasilan dan capaian masing-masing output **tercapai 100%**



## RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

Penanggungjawab Renaksi **Ditjen Adwil** dengan target 2 output Ukuran Keberhasilan dan capaian masing-masing output **tercapai 100%**



## PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

Penanggungjawab Renaksi **Ditjen Bina Adwil** dan Ditjen Pemdes dengan 3 Output Ukuran Keberhasilan dan capaian masing-masing output **tercapai 100%**



## RENCANA AKSI HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)

Penanggungjawab Renaksi **Ditjen Bina Adwil**, Ditjen Pemdes dan Ditjen Dukcapil dengan 4 Output Ukuran Keberhasilan dan capaian masing-masing output **tercapai 100%**



## RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT

Penanggungjawab Renaksi Ditjen Dukcapil dengan 3 output ukuran keberhasilan, 2 output **tercapai 100%** dan 1 output **tercapai 95%**



## RENCANA AKSI JANJI PRESIDEN

Penanggungjawab Renaksi Ditjen Dukcapil, Ditjen Bangda **dan Ditjen Bina Adwil** dengan 5 output Ukuran Keberhasilan dan capaian masing-masing output **tercapai 100%**



## RENCANA AKSI PROGRAM PENYUSUNAN PP DAN PERPRES TAHUN 2018

Penanggungjawab BNPP dengan 3 Output ukuran keberhasilan **belum tercapai** karena akan diselesaikan pada tahun 2019 sesuai Surat Mendagri No.180/10872/SJ tanggal 6 Des 2018



**Ditjen Bina Adwil mendapatkan penugasan Renaksi Tahun 2018, yaitu Kebijakan Kelautan Indonesia, Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Janji Presiden dengan capaian 100%**



# PELAKSANAAN RENAKSI LINGKUP PENUGASAN KEMENDAGRI TAHUN 2019

No	Rencana Aksi /Kegiatan	Penanggung jawab	Koord Pelaporan	Jml UK	Progres Capaian s.d B03				Ket
A	Renaksi Hak Azasi Manusia (RANHAM)								
1	Optimalisasi koordinasi pelaksanaan Aksi HAM di Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.	Ditjen Bina Adwil	BiroRen	1		1			
2	Fasilitasi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014, terkait Pengakuan masyarakat Hukum Adat dan wilayah adatnya	Ditjen Bina Pemdes	BiroRen	1		1			
3	Percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam rangka tertib administrasi kependudukan bagi penduduk rentan di wilayah Kantong Kemiskinan	Ditjen Dukcapil	BiroRen	1		1			
4	Percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka tertib administrasi kependudukan (adminduk) bagi penduduk rentan adminduk di wilayah kantong kemiskinan	Ditjen Dukcapil	BiroRen	1		1			
B	Renaksi OGI								
1	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa yang Akuntabel	Ditjen Bina Pemdes	BiroRen	2		2			
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislati.	Ditjen Otda	BiroRen	1		1			



# PELAKSANAAN RENAKSI LINGKUP PENUGASAN KEMENDAGRI TAHUN 2019

No	Rencana Aksi /Kegiatan	Penanggung jawab	Koord Pelaporan	Jml UK	Progres Capaian s.d B03				Ket
C	Renaksi Janji Presiden (Program Prioritas)								
1	Stunting : Penguatan posyandu	Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Pemdes	BiroRen	Sedang dalam proses pembahasan penajaman kegiatan prioritas					
2	Stunting : Kampanye pencegahan stunting	Ditjen Bina Bangda	BiroRen						
3	Perbatasan	Ditjen Bina Adwil	BiroRen						
D	Renaksi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat								
1	Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	Ditjen Bina Bangda, Ditjen Dukcapil, dan Ditjen Polpum	BiroRen	Sedang dalam proses pembahasan penajaman kegiatan prioritas					
E	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)								
1	Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal	Ditjen Bina Adwil	BiroRen	2		1	1		
2	Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan	Ditjen Bina Adwil	BiroRen	2		2			
3	Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Batuan Sosial dan Subsidi	Ditjen Dukcapil	BiroRen	1			1		
4	Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta	Ditjen Bina Keuda	BiroRen	1				1	
5	Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik	Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Keuda	BiroRen	1			1		



# PELAKSANAAN RENAKSI LINGKUP PENUGASAN KEMENDAGRI TAHUN 2019

No	Rencana Aksi /Kegiatan	Penanggung jawab	Koord Pelaporan	Jml UK	Progres Capaian s.d B03				Ket
6	Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Ditjen Otda	BiroRen	1			1		
7	Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak	Ditjen Bina Keuda	BiroRen	1				1	
8	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Itjen, Ditjen Otda dan Biro Ortala	BiroRen	6		3	3		
9	Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa	Itjen	BiroRen	2		1	1	2	

**Ket.Capaian :**



→ Capaian  $\geq$  100%



→ Capaian 65% - 85%



→ Capaian 85% - 100%



→ Capaian 0 - 65%

## **2. PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS (PN)**





# Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2019





# Pemantauan Kinerja Output Prioritas Nasional Ditjen Bina Adwil

No	PROYEK K/L	TARGET		PAGU	LOKASI TARGET
		VOLUME	SATUAN	(Rp. Ribu)	
1	Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana	5	Angkatan	1,650,000	
2	Pembinaan penyusunan rencana penanggulangan bencana	103	Daerah	1,000,000	Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kab. Lahat, Kab. Banyuasin, Kab. Rejang Lebong, Kab. Lampung Selatan, Kota Bengkulu, Kab. Lampung Selatan, Kab. Tanggamus, Kota Tanjung Pinang, Provinsi DKI, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kab. Tasikmalaya, Kab. Cianjur, Kab. Pangandaran, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kab. Cilacap, Kab. Kebumen, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Demak, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tanah Laut, Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Kapuas, Kota Palangkaraya, Kab. Balangan, Kab. Katingan, Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Klungkung, Kab. Bangli, Kab. Karang Asem, Kab. Buleleng, Kota Denpasar, Kota Binjai, Kab. Karo, Kota Padang, Kab. Sijunjung, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kab. Kerinci, Kota Pangkal Pinang, Kab. Bangka Tengah, Kab. Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kab. Pacitan, Kab. Tuban, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan, Kab. Madiun, Kab. Gresik, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, Kab. Minahasa, Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Kutai Barat, Kota Samarinda, Kota Ambon, Kab. Buru Selatan, Kota Ternate.
3	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	34	Provinsi	1,200,000	34 Provinsi



## Pemantauan Kinerja Output Prioritas Nasional Ditjen Bina Adwil

No	PROYEK K/L	TARGET		PAGU (Rp. Ribu)	LOKASI TARGET
		VOLUME	SATUAN		
4	PTSP Prima di Daerah	75	Kab-Kota	7,300,000	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Provinsi Sumut (Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Dairi, Kabupaten Labuan Batu, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan)</li><li>2. Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran)</li><li>3. Provinsi Kalteng (Kota Palangkaraya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Katingan)</li><li>4. Provinsi Kaltara (Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau)</li><li>5. Provinsi NTT (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Ngada, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat)</li><li>6. Provinsi Sulteng (Kota Kendari, Kota Bau Bau, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan)</li><li>7. Provinsi Sulut (Kota Mobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Minahasa Selatan)</li><li>8. Provinsi Sulbar (Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah)</li><li>9. Provinsi Maluku Utara (Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai)</li><li>10. Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke)</li></ol>



## Pemantauan Kinerja Output Prioritas Nasional Ditjen Bina Adwil

No	PROYEK K/L	TARGET		PAGU (Rp. Ribu)	LOKASI TARGET
		VOLUME	SATUAN		
5	Sistem E-Monev PTSP yang terintegrasi	34	Provinsi	2,500,000	34 Provinsi
6	Penyusunan kesepakatan kerjasama Pemda dengan dunia usaha dalam pemanfaatan lulusan sekolah vokasi	3	Provinsi	1,300,000	Wakatobi, Kepulauan Seribu, Bromo
7	Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara	5	Kesepakatan	4,800,000	
8	Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah	6	Provinsi	2,500,000	Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi NTT, Provinsi Kalbar, Provinsi Kaltara, Provinsi Papua. (Penambahan 1 Provinsi Sulut)
9	Jumlah daerah yang diberikan pembekalan Satpol PP dan Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam rangka pemilu	34	Provinsi	4,000,000	34 Provinsi



## Tindak Lanjut Pelaksanaan Renaksi

**Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan tahun 2019 mulai dari proses penyusunan, pembahasan target ukuran keberhasilan, sampai dengan pelaporan dan data dukung yang harus disiapkan**

**Komponen/Unit Kerja penanggung jawab Aksi agar mengawal pembahasannya dengan memperhatikan lingkup kewenangan, tugas dan fungsi, dukungan anggaran, kemampuan pencapaian target, serta prioritas dan dukungan kebijakan baik nasional maupun internal Kemendagri.**

**Komponen/Unit Kerja yang menjadi koordinator pelaporan Renaksi agar mengawal substansi baik penyusunan Renaksi maupun pelaporannya.**



# Terima Kasih

